

Surat Kabar : Republika
Subyek : Greenpeace

Edisi : 06 Agustus 2011
Halaman : 12

Greenpeace Bantah Gunakan Dana Haram

DPR menilai, keberadaan Greenpeace masih dibutuhkan.

JAKARTA - Greenpeace perwakilan Indonesia membantah tuduhan telah menggunakan dana lotre atau judi untuk membiayai operasional mereka. LSM internasional yang bergerak di bidang lingkungan itu menegaskan, tidak pernah memakai dana dari sumber haram.

"Kita tidak pakai dana itu." ujar Juru Bicara Greenpeace Indonesia Bustar Makar, saat dihubungi Republika, Jumat (5/8).

Bustar menduga, isu tersebut sengaja diembuskan oleh para perusak lingkungan. Target mereka adalah Greenpeace henggang dari Indonesia dan tak lagi menghalangi aktivitas perusakan lingkungan. Hingga saat ini, tegas Bustar, Greenpeace Indonesia eksis hanya dari sumbangan 30 ribu supporter yang mendona-sikan Rp 50 ribu tiap bulannya.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa Greenpeace pusat di Amster-dam, Belanda, memperoleh dana dari Postcode Lottery. Tapi, jumlahnya hanya sedikit. Sebagian besar diperoleh dari donasi masyarakat. "Sedangkan, Greenpeace Indonesia tak pernah menerima dana judi itu, bahkan kucuran dari pihak asing sekali pun," tegasnya.

Terkait desakan agar Greenpeace tak beroperasi di Indonesia, ia menilai, desakan itu tidak proporsional. Terlebih, selama ini, Greenpeace selalu mematuhi peraturan yang ada. "Kecuali jika pemerintah menyatakan adanya pelanggaran. Kita pertimbangkan, tapi faktanya kita telah ikut aturan."

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, setiap kucuran uang yang diperoleh dari lotre atau judi haram hukumnya. Tak terkecuali dana judi yang masuk ke kantong Greenpeace.

Dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (4/8), Ketua MUI Amidhan menyinyalir, dana haram yang berasal dari lotre bisa jadi modus lain dari praktik pencucian uang. Padahal, menurut fatwa MUI, pencucian uang hukumnya haram. "Dan, itu (pencucian uang) dilarang di Indonesia," ujarnya.

Dalam pernyataan tertulis itu, Amidhan juga menyatakan, peme-rintah sepatutnya melarang Greenpeace beroperasi di Indonesia. "Terlebih, Greenpeace kerap mewakili kepentingan asing di wilayah Indonesia."

Jangan mudah memvonis

Terkait hal ini, anggota Komisi VII DPR RI Achmad Rilyadi meminta, agar semua pihak tidak menghakimi Greenpeace Indonesia terkait penggunaan dana lotre. Menurutnya, kebenaran informasi tersebut mesti diperoleh langsung dari lembaga yang bersangkutan.

Namun, ia mengakui, langkah itu merupakan hal yang sulit karena sistem audit LSM dinilai belum memadai. "Tidak bisa diaudit," katanya.

Terkait desakan agar pemerintah melarang Greenpeace beroperasi di Indonesia, Rilyadi menilai, kinerja LSM asing ini masih proporsional dan positif. Ia belum melihat indikasi pelanggaran ataupun keberpihakan pada kepentingan asing.

Menurutnya, kehadiran LSM seperti Greenpeace masih dibutuhkan mengingat pengawasan dan kontrol terhadap pendayagunaan alam di Indonesia lemah. "Setuju banget ada yang mengawasi," katanya.